

Sunset Tekstil: Merajut Kembali Industri yang Berpihak Pada Pekerja

Tim Penulis

Tania El Mahrunisa & Thelma Ghinaya

Editor

Radhiyan Pribadi

Sunset Tekstil: Merajut Kembali Industri yang Berpihak Pada Pekerja

Penerbit

Institut Harkat Negeri (IHN)
Jakarta, Indonesia

Alamat Surat Elektronik

sekretariat@ihn.or.id

Situs Web

<https://institutharkatnegeri.org/>

Hak Cipta

© 2025 IHN
Institut Harkat Negeri memegang hak cipta publikasi ini, termasuk analisis, logo, dan desain tata letak. Permintaan untuk memperbanyak sebagian atau seluruh isi publikasi dikirimkan ke sekretariat@ihn.or.id

Penghargaan

Kami mengucapkan terima kasih mendalam kepada Sudirman Said, Wahyu Prasetyawan, John Paterson, dan Marco Kusumawijaya sebagai dewan penasihat penelitian dan Yurgen Alifia Sutarno sebagai Direktur Eksekutif IHN yang telah memberikan masukan membangun untuk penyusunan laporan ini.

Pengutipan

Seluruh isi dalam laporan ini bebas dikutip selama mencantumkan sumber sesuai konteks dan ketentuan penulisan berlaku.
Yang disarankan: Mahrunita Tania & Ghinaya Thelma. "Sunset Tekstil: Merajut Kembali Industri yang Berpihak Pada Pekerja." Disunting oleh Radhiyan Pribadi. Institut Harkat Negeri. (2025). institutharkatnegeri.org

Penata Desain

Naufal Islam

Bulan Terbit

April 2025

Ringkasan Eksekutif

Intisari

- Industri tekstil dan produk tekstil (TPT), yang dulu menjadi andalan penyerap tenaga kerja, kini menghadapi krisis. Kontribusinya terhadap PDB manufaktur nonmigas terus merosot, sementara PHK massal telah berdampak pada lebih dari 250.000 pekerja antara 2022 hingga 2024.
- Tekanan datang dari dua arah: perang dagang global dan stagnasi internal di rantai pasok.
- Masalah struktural di setiap lapisan rantai pasok yakni kapasitas produksi bahan baku yang rendah di sektor hulu, teknologi usang di sektor antara, hingga tekanan biaya dan banjir impor di sektor hilir, memperlihatkan bahwa revitalisasi industri hanya bisa berhasil dengan membangun kemandirian industri dari hulu hingga hilir.
- Indonesia perlu memperkuat daya saing industri dari hulu ke hilir, sekaligus merancang transisi yang adil dan melindungi pekerja.

Mengapa ini penting?

Keberlangsungan industri TPT bukan hanya tentang kontribusi tekstil terhadap PDB, tetapi juga tentang penghidupan jutaan orang yang menggantungkan nasibnya di industri padat karya ini. Dengan lebih dari 250.000 pekerja tekstil terdampak PHK hingga 2024, setiap kegagalan dalam menyelamatkan industri berarti memperdalam ketimpangan sosial dan memperlemah ekonomi yang bergantung pada sektor ini.

Jika tidak ada langkah strategis yang berimbang antara pembangunan kemandirian produksi, modernisasi industri, proteksi, dan transformasi tenaga kerja, Indonesia berisiko kehilangan salah satu mesin pergerak ekspor dan penyerap tenaga kerja terbesarnya. Tantangannya ialah menjaga keberlanjutan industri sekaligus melindungi pekerja secara lebih adil, inovatif, tahan terhadap guncangan global yakni otomasi dan persaingan perdagangan bebas.

Policy brief ini bertujuan untuk...

1. Mengidentifikasi strategi untuk menciptakan dan mempertahankan lapangan kerja di sektor padat karya, khususnya industri TPT.
2. Menganalisis menyeluruh terhadap tantangan struktural industri TPT dari hulu hingga hilir yang melemahkan daya saing industri.
3. Merumuskan kerangka kebijakan bertahap yang mendukung pemulihan industri sekaligus memitigasi risiko.

Tantangan Industri TPT

1. Sektor hulu

Terbatasnya kapasitas bahan baku lokal menyebabkan ketergantungan impor dan lemahnya daya saing terhadap produk impor murah

2. Sektor antara

Mesin produksi yang tua menurunkan daya saing dan menghambat suplai bahan ke sektor hilir

3. Sektor hilir

Ongkos produksi mahal karena impor bahan baku dan banjir impor ilegal murah merusak daya saing industri lokal.

Rekomendasi Kebijakan

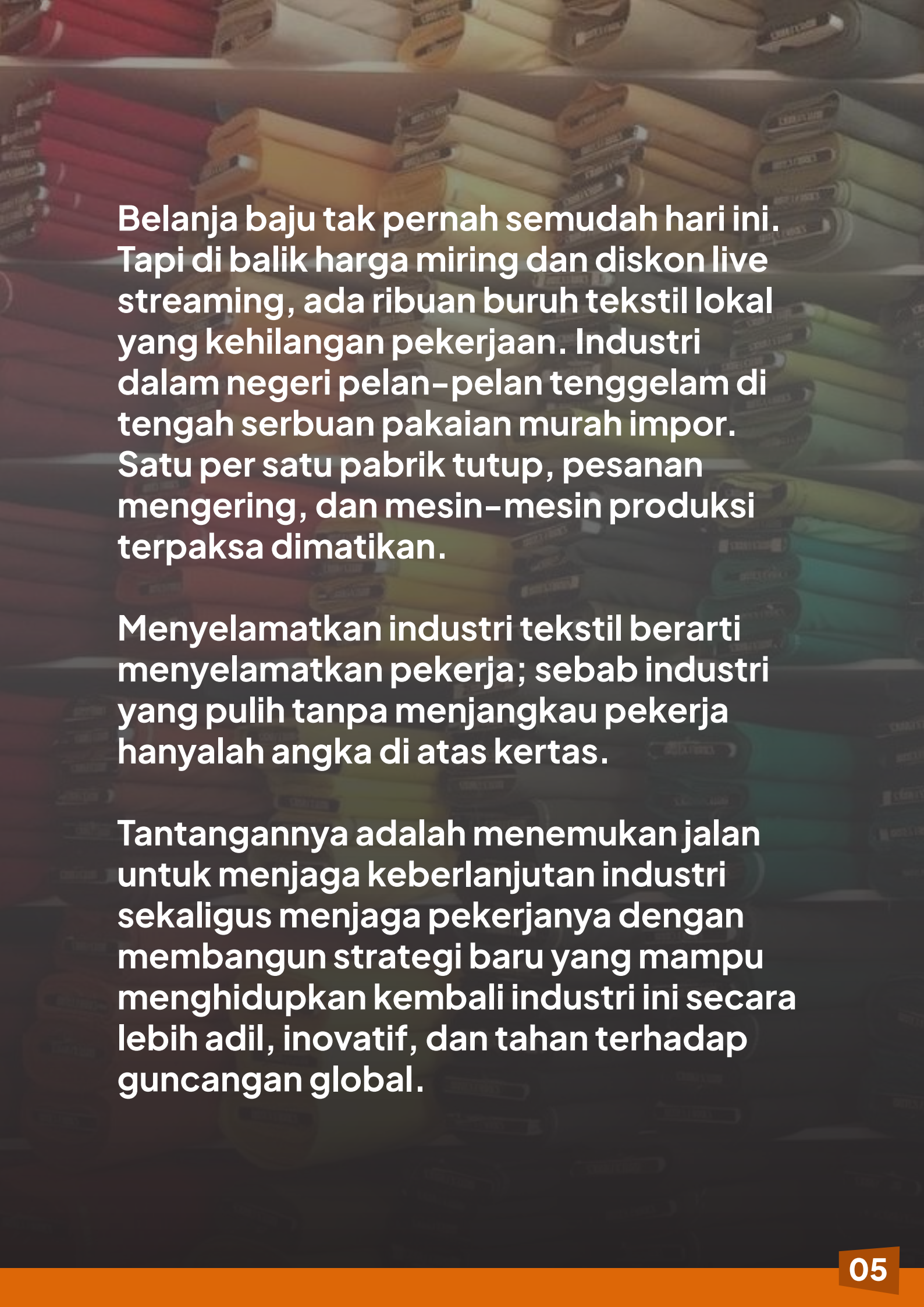
1. **Jangka pendek:** melindungi industri padat karya TPT yang tertekan
 - a. Penerapan tarif & hambatan non-tarif
 - b. Kepres Satgas Impor Ilegal
2. **Jangka menengah:** memperkuat ketahanan industri TPT dari hulu ke hilir
 - a. Sektor hulu (*Upstream*)
 - i. Penerapan bea *anti-dumping* yang Proporsional
 - ii. Subsidi gas industri tekstil
 - iii. Penjaminan pasokan MEG
 - b. Sektor antara (*Midstream*)
 - i. Perluasan skema insentif untuk modernisasi mesin
 - c. Sektor hilir (*Downstream*)
 - i. Pembangunan kemandirian industri dengan insentif
 - ii. Penguatan pengawasan untuk cegah banjir impor ilegal
3. **Jangka panjang:** transisi dan perlindungan pekerja
 - a. *Upskilling* dan *Reskilling* pekerja
 - i. Pengembangan peta okupasi dan kompetensi di industri TPT
 - ii. Integrasi pelatihan vokasional ke kebijakan industri nasional
 - iii. Kemitraan perusahaan penerima insentif fiskal dengan lembaga pelatihan vokasi
 - b. Perluas skema perlindungan sosial bagi pekerja yang terdampak
 - i. Pengembangan mekanisme *income replacement*
 - ii. Penyediaan opsi jaminan sosial atau pensiun dini untuk kelompok *non-reskillable*
 - iii. Perluasan cakupan dan desain sistem perlindungan sosial

Daftar Isi:

Ringkasan Eksekutif	2
Daftar Isi	3
Daftar Singkatan	4
BAGIAN I	5
PENDAHULUAN	5
Industri TPT: Penyerap Tenaga Kerja yang Kini Terancam	6
Berbagai Tekanan Industri TPT	6
Pemerintah Mulai Bergerak	7
Ruang Lingkup Analisis	7
BAGIAN II	8
ANALISIS	8
I. SEKTOR HULU (<i>UPSTREAM</i>)	8
Definisi dan Peran Rantai Pasok	8
Jenis dan Hasil Produksi	8
Tantangan Sektor Hulu di Indonesia: Kurangnya Kapasitas dan Daya Saing	8
1. Kapasitas Produksi Bahan Baku Terbatas, Impor Tak Terhindarkan	8
2. Kapasitas Produksi Bahan Baku Lokal Ada, Impor Murah Tetap Menang	8
II. SEKTOR ANTARA (<i>MIDSTREAM</i>)	9
Definisi dan Peran Rantai Pasok	9
Jenis dan Hasil Produksi	9
Tantangan Sektor Antara di Indonesia: Mesin Tua	9
III. SEKTOR HILIR (<i>DOWNSTREAM</i>)	9
Definisi dan Peran Rantai Pasok	9
Jenis dan Hasil Produksi	10
Tantangan Sektor Hilir di Indonesia: Ongkos Produksi dan Impor Produk Murah	10
1. Ongkos Produksi Mahal, Pabrik Tertekan	10
2. Banjir Pakaian Impor Murah Ilegal	10
BAGIAN III	11
REKOMENDASI	11
I. Jangka pendek: melindungi industri padat karya TPT yang tertekan	11
Penerapan Tarif & Hambatan Non-Tarif	11
Mengeluarkan Kepres Satgas Impor Ilegal	11
II. Jangka menengah: memperkuat ketahanan industri TPT dari hulu ke hilir	11
A. Sektor hulu (<i>Upstream</i>): menurunkan biaya produksi dalam negeri	11
1. Penerapan Bea <i>Anti-Dumping</i> yang Proporsional	11
2. Subsidi gas industri tekstil	11
3. Penjaminan pasokan MEG	11
B. Sektor Antara (<i>Midstream</i>)	11
1. Perluasan skema insentif untuk modernisasi mesin	12
C. Sektor Hilir (<i>Downstream</i>)	12
1. Pembangunan Kemandirian Industri dengan Insentif	12
2. Penguatan Pengawasan Untuk Cegah Banjir Impor Ilegal	12
III. Jangka panjang: Transisi dan Perlindungan Pekerja	12
1. <i>Upskilling</i> dan <i>Reskilling</i> Pekerja	11
2. Perluas skema perlindungan sosial bagi pekerja yang terdampak	13
Penutup	14

Daftar Singkatan:

AMTI	Aliansi Masyarakat Tekstil Indonesia
APSyFI	Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia
AS	Amerika Serikat
API	Asosiasi Pertekstilan Indonesia
BMTF	Bea Masuk Tindakan Pengamanan
ESDM	Energi dan Sumber Daya Mineral
GDP	Gross Domestic Product
HGBT	Harga Gas Bumi Tertentu
HPP	Harga Pokok Produksi
ILO	International Labour Organization
ITC	<i>International Trade Center</i>
Keppres	Keputusan Presiden
MEG	<i>Monoethylene glycol</i>
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
rMEG	<i>Recycling monoethylene glycol</i>
MMBTU	Satuan energi untuk mengubah panas/ <i>Metric Million British Thermal Unit</i>
Satgas	Satuan Tugas
TPT	Tekstil dan produk tekstil
PHK	Pemutusan hubungan kerja
PDB	Produk Domestik Bruto



Belanja baju tak pernah semudah hari ini. Tapi di balik harga miring dan diskon live streaming, ada ribuan buruh tekstil lokal yang kehilangan pekerjaan. Industri dalam negeri pelan-pelan tenggelam di tengah serbuan pakaian murah impor. Satu per satu pabrik tutup, pesanan mengering, dan mesin-mesin produksi terpaksa dimatikan.

Menyelamatkan industri tekstil berarti menyelamatkan pekerja; sebab industri yang pulih tanpa menjangkau pekerja hanyalah angka di atas kertas.

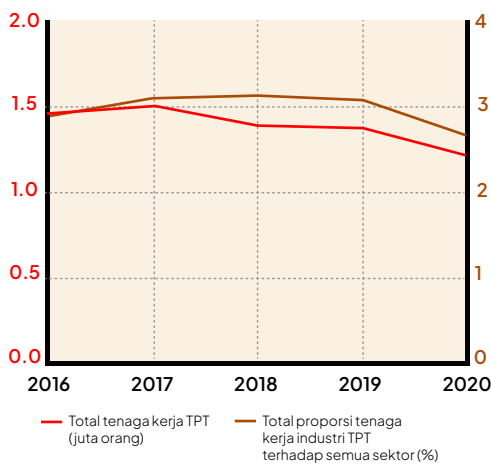
Tantangannya adalah menemukan jalan untuk menjaga keberlanjutan industri sekaligus menjaga pekerjanya dengan membangun strategi baru yang mampu menghidupkan kembali industri ini secara lebih adil, inovatif, dan tahan terhadap guncangan global.

BAGIAN I PENDAHULUAN

Industri TPT: Penyerap Tenaga Kerja yang Kini Terancam

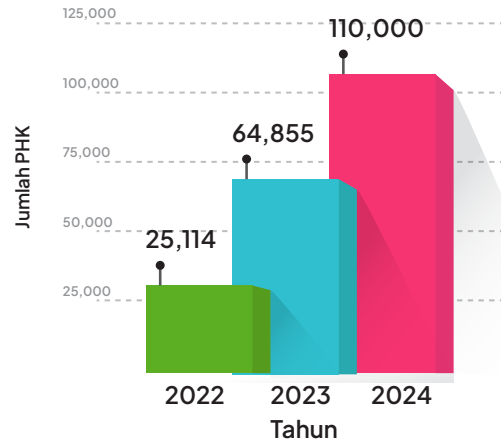
Setelah lama jadi andalan ekspor dan penyerap tenaga kerja, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia kini terseok. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) manufaktur nonmigas terus menurun signifikan, dari 7,08 persen pada tahun 2019 menjadi hanya 5,97 persen pada 2023.¹ Penurunan ini mencerminkan kemunduran daya saing industri yang dulu sempat menjadi primadona nasional.

Tren Proporsi dan Total Tenaga Kerja Industri TPT (2016 – 2020)



Gambar 1. Tren Proporsi dan Total Tenaga Kerja Industri TPT (2016–2020).
Sumber data: BPS dari berbagai tahun.

Kondisi ini tercermin jelas dalam berkurangnya total pekerja di sektor TPT, antara lain akibat lonjakan pemutusan hubungan kerja. Menurut data BPS, jumlah pekerja industri TPT besar dan sedang berkurang sekitar 242 ribu dari tahun 2016 ke 2020.² Di periode yang sama, total proporsi tenaga kerja industri TPT pun turun (Lihat Gambar 1). Artinya, pengurangan ini bukan bagian dari tren umum ketenagakerjaan, tetapi memang terjadi secara spesifik di sektor TPT. Sepanjang 2022 sampai 2024 pun, tingkat pemutusan hubungan kerja (PHK) meningkat signifikan, dari sekitar 25 ribu kasus di 2022 menjadi 110 ribu kasus di 2024 (Lihat Gambar 2). Secara total, hanya dalam kurun waktu 2 tahun, estimasi jumlah orang yang menjadi korban PHK adalah 200.000,³ hingga 250.000 orang.⁴ Krisis ini bahkan tak hentinya melanda pada tahun 2025 ketika PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, resmi dinyatakan pailit.⁵



Gambar 2. Jumlah PHK di Industri TPT dari Tahun 2022–2024.⁶

Berbagai Tekanan Industri TPT

Di level internasional, tekanan eksternal datang dari kebijakan kenaikan tarif era Presiden Donald Trump dan juga persaingan ketat dengan negara eksportir TPT lainnya. Tarif tersebut adalah pajak yang dikenakan pada barang dari luar negeri yang masuk ke Amerika Serikat (AS). Mengingat pasar AS menyerap sekitar 10,3 persen dari total ekspor nonmigas Indonesia, kebijakan tarif ini secara langsung memukul industri padat karya seperti tekstil yang sangat bergantung pada permintaan dari AS.⁷ Terpukulnya industri tekstil diperkirakan akan mem-^{PHK} 191.000 pekerja di industri TPT.⁸ Di saat yang bersamaan, Indonesia juga masih harus bersaing ketat dengan eksportir besar lain seperti Tiongkok, Vietnam, dan Bangladesh di industri TPT.

Di level domestik, industri TPT Indonesia dihantam oleh maraknya praktik impor ilegal, seperti ketika Kemendag menyita barang tekstil ilegal senilai Rp90 miliar,⁹ yang tak hanya melanggar hukum, tapi juga menciptakan kompetisi yang tidak sehat di pasar domestik. Salah satu indikasi mencolok terlihat dari perbedaan signifikan antara data ekspor Tiongkok dan data impor Indonesia untuk produk TPT. Pada 2023, misalnya, Tiongkok mencatat nilai ekspor senilai US\$5,3 miliar ke Indonesia, namun data Indonesia hanya mencatat impor sebesar US\$3,8 miliar.¹⁰ Selisih sebesar US\$1,5 miliar ini mengindikasikan praktik penurunan nilai impor (*under-invoicing*) yang merugikan penilaian negara dan melemahkan daya saing industri TPT lokal.¹¹ Apalagi dengan tarif Trump, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) memperingatkan bahwa Indonesia berpotensi menjadi tempat penjualan tekstil baru bagi negara-negara dengan kelebihan kapasitas produksi yang tidak lagi bisa diserap pasar AS.¹² Dampaknya, hal ini dapat memperparah beban persaingan yang sudah berat.¹³

Di samping tekanan dari level internasional dan domestik, kemacetan dari dalam tubuh industri TPT juga menjadi persoalan, misalnya, minimnya investasi dalam inovasi teknologi. Menurut Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), sekitar 70 persen dari mesin yang digunakan di industri ini merupakan mesin lama yang berasal dari tahun 1990–an.¹⁴ Hal ini juga diamini oleh Kemenperin yang menyatakan bahwa biang kerok badai PHK di industri tekstil diakibatkan oleh mesin yang tua.¹⁵ Padahal, inovasi teknologi penting untuk meningkatkan efisiensi produksi sehingga dapat menurunkan harga produksi. Ekonom Fithra Faisal Hastiadi menjelaskan bahwa Sritex pun enggan memperbarui mesin-mesinnya ataupun mencari pasar baru.¹⁶ Akibatnya, ketergantungan pada model produksi lama membuat biaya operasional tinggi, apalagi dengan adanya kenaikan upah minimum yang meningkat 6,5 persen tahun 2025.¹⁷ Kombinasi antara beban biaya dan ketertinggalan teknologi ini menciptakan tekanan ganda yang menyulitkan perusahaan TPT untuk bertahan. Oleh karena itu, upaya penyelamatan industri TPT ke depan tidak bisa hanya bertumpu pada proteksi pasar, melainkan harus mengakselerasi inovasi teknologi dan perbaikan skema produksi agar lebih kompetitif di pasar global.

Pemerintah Mulai Bergerak

Sebagai respons terhadap krisis ini, Presiden Prabowo mengusulkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Padat Karya untuk mengatasi banjir produk murah dari luar negeri dan menjaga stabilitas ketenagakerjaan nasional.¹⁸



Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah akan mendorong deregulasi (pengurangan atau penghapusan regulasi yang menghambat), debirokratisasi

(penyederhanaan prosedur administrasi dan birokrasi), dan kemudahan perizinan untuk seluruh industri padat karya.¹⁹

Langkah-langkah ini perlu diapresiasi, namun setiap sektor memiliki tantangan unik yang perlu diselidiki lebih lanjut. Untuk itu, diperlukan analisis khusus untuk mengidentifikasi tantangan dan merumuskan solusi di sektor TPT yang juga berpihak pada pekerja.

Ruang Lingkup Analisis

Policy brief ini berangkat dari satu realitas: jutaan pekerja Indonesia bergantung pada industri padat karya seperti sektor TPT untuk hidup. Maka, tujuan akhir dari policy brief ini adalah untuk menyelidiki cara menciptakan dan menjaga lapangan kerja. Struktur industri TPT terdiri dari

tiga tahap utama: upstream (hulu), midstream (antara), dan downstream (hilir). Sektor TPT yang menyerap paling banyak tenaga kerjanya di tahapan hilir, yaitu 75% dari total tenaga kerja TPT, atau 2.916.005 orang di tahun 2024.²⁰ Artinya, karakter padat karya sektor TPT tidak merata dari hulu ke hilir, melainkan terkonsentrasi di hilir. Namun, untuk menyelamatkan sektor hilir yang paling padat karya, diperlukan analisis menyeluruh dari tahapan hulu untuk mengidentifikasi masalah yang berkontribusi pada tekanan yang dialami tahapan hilir. Untuk itu, policy brief ini akan menganalisis berbagai tantangan yang membelit industri TPT Indonesia dari level hulu sampai hilir.

Mengingat realitas global yang tengah bergerak menjauh dari industri padat karya menuju otomasi, yaitu penggantian tenaga manusia dengan tenaga mesin,²¹ Indonesia perlu menyiapkan strategi transisi yang berjenjang.

Bahkan sejak 2015, The Economist telah memperingatkan: “mesin jahit robotik bisa menggantikan pekerja garmen di negara berkembang yang mengandalkan biaya tenaga kerja murah.”²²

Posisi policy brief ini melihat kondisi Indonesia yang belum beralih ke otomasi penuh sebagai peluang untuk merencanakan transisi yang berkelanjutan. Banyak pelaku industri masih bergantung pada mesin-mesin tua, dan sistem pelatihan kerja belum mampu menyiapkan tenaga kerja untuk sektor yang lebih terotomatisasi. Di saat yang bersamaan, jutaan pekerja yang rentan terhadap PHK, atau bahkan sudah terkena PHK, masih menggantungkan hidup mereka dan keluarga yang mereka tanggung pada sektor padat karya.

Oleh karena itu, pendekatan yang ditawarkan sebagai solusi dalam policy brief ini dibangun di atas kerangka waktu yang bertahap untuk memitigasi risiko sosial-ekonomi dan memastikan kesiapan tenaga kerja:

1. Jangka pendek, menyelamatkan industri padat karya TPT yang tertekan;
2. Jangka menengah, memperkuat ketahanan industri TPT dengan membangun daya saing dari sektor hulu (bahan mentah) ke hilir (ritel);
3. Jangka panjang, mentransformasi industri TPT secara struktural menuju otomasi, dengan perlindungan sosial dan upskilling untuk tenaga kerja yang terdampak.

BAGIAN II
ANALISIS

Industri tekstil terdiri dari tiga bagian utama dalam rantai pasoknya, yaitu sektor hulu (*upstream*) yang mencakup produksi bahan baku seperti serat dan benang, sektor antara (*midstream*) yang berfokus pada proses pemintalan dan penenunan, serta sektor hilir (*downstream*) yang meliputi pembuatan produk jadi seperti pakaian dan tekstil rumah tangga. Untuk memahami dinamika industri ini secara menyeluruh, penting untuk menggali bagaimana setiap lapisan saling terkait dan berkontribusi terhadap kinerja akhir industri tekstil. Oleh karena itu, bagian ini akan menganalisis tiap lapisan rantai pasok untuk mengidentifikasi hambatan, efisiensi, dan peluang peningkatan nilai tambah dalam industri tekstil nasional.

I. SEKTOR HULU (*UPSTREAM*)
Definisi dan Peran Rantai Pasok

Sektor hulu memegang peran krusial dalam rantai pasok tekstil karena menentukan ketersediaan, kualitas, dan harga bahan baku di tahap awal produksi. Di tahap ini, aktivitas utama mencakup produksi serat dan proses pemintalan menjadi benang. Ketika sektor hulu tidak efisien, dampaknya langsung terasa ke hilir. Misalnya, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menyebut depresiasi rupiah menaikkan biaya produksi tekstil lokal karena bahan baku berbasis dolar.²³ Dampaknya, margin produsen menyusut dan daya saing produk ikut melemah. Oleh karena itu, penting untuk memastikan sektor hulu bisa mandiri dan memberikan pasokan bahan baku yang berkualitas dan terjangkau demi keberlangsungan industri dan terjaganya lapangan kerja sampai ke hilir.

Jenis dan Hasil Produksi

Untuk memahami struktur dasar sektor hulu ini, berikut adalah klasifikasi jenis industri tekstil beserta hasil produksinya, mulai dari industri serat hingga pemintalan dan pencelupan benang:

Jenis Industri	Tujuan Pengolahan
Industri Serat Alam	1. Kapas 2. Sutra 3. Rami 4. Wol dan lainnya.
Industri Serat Buatan dan Benang Filamen	Industri ini mengolah bahan kimia seperti PX, PTA, MEG, dan bubur kayu menjadi serat pendek dan benang panjang. Hasilnya bisa berupa bahan seperti polyester, nylon, dan rayon yang dipakai untuk membuat kain dan pakaian.
Industri Pemintalan	Memproduksi benang dari bahan baku berupa serat buatan maupun serat alam atau campuran keduanya.

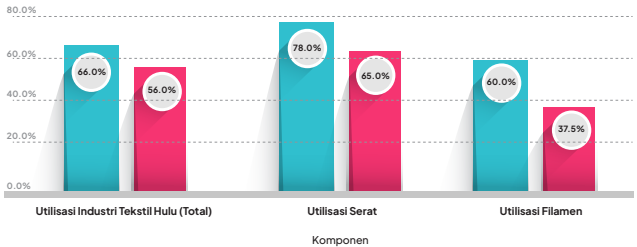
Industri Pencelupan Benang	Untuk memberikan warna pada benang
----------------------------	------------------------------------

Sumber: Buku Analisis Pembangunan Industri, Kementerian Perindustrian (2021).²⁴

Tantangan Sektor Hulu di Indonesia:
Kurangnya Kapasitas dan Daya Saing

Sektor hulu industri tekstil Indonesia menghadapi tekanan besar terkait bahan baku diakibatkan berbagai dinamika. Meskipun kapasitas lokal tersedia, ketergantungan pada impor tetap tinggi karena kapasitas lokal tidak mencukupi. Di sisi lain, produk impor yang lebih murah semakin mendominasi pasar, sementara depresiasi rupiah membuat bahan baku impor lebih mahal, meningkatkan Harga Pokok Produksi (HPP) sampai di tahap hilir. Kenaikan HPP ini memicu efisiensi, termasuk pengurangan tenaga kerja. Fenomena ini tercermin dalam penurunan pemanfaatan kapasitas sektor hulu, yang hanya mencapai setengah dari kapasitas produksi yang tersedia (Lihat Gambar 3).²⁵ Bagian ini akan menjabarkan secara lebih lanjut permasalahan-permasalahan tersebut untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi aktual sektor hulu tekstil.

Tingkat Utilisasi Industri Tekstil Hulu di Indonesia
2021 dan 2024



Gambar 3. Tingkat Utilisasi Industri Tekstil Hulu di Indonesia (Tahun 2021 dan 2024)

1. Kapasitas Produksi Bahan Baku Terbatas, Impor Tak Terhindarkan

Indonesia menghadapi persoalan mendasar dalam industri tekstil, yaitu keterbatasan kapasitas produksi bahan baku di hulu yang menyebabkan ketergantungan tinggi pada impor. Salah satu contoh utamanya adalah *monoethylene glycol* (MEG), bahan baku penting untuk produksi polyester. Indonesia hanya mampu memproduksi 8.3% dari kebutuhan sebesar 600.000 ton MEG, sehingga sisanya harus dipenuhi melalui impor,²⁶ terutama dari Arab Saudi. Situasi ini semakin diperparah dengan fakta bahwa hanya ada satu produsen MEG yang beroperasi di Indonesia.²⁷ Tanpa pasokan dari luar dan tidak adanya suplai lokal, pabrik-pabrik polyester di Indonesia terancam berhenti beroperasi, menegaskan bahwa ketergantungan pada impor bahan baku tetap menjadi titik lemah struktural dalam industri tekstil nasional.

2. Kapasitas Produksi Bahan Baku Lokal Ada, Impor Murah Tetap Menang

Kapasitas produksi bahan baku lokal Indonesia tersedia untuk beberapa pasokan,

namun impor murah tetap mendominasi pasar. Ekonom dari INDEF menyoroti dilema yang dihadapi oleh industri tekstil Indonesia, yaitu antara membiarkan impor murah yang merugikan produsen lokal atau membatasi impor yang dapat mengganggu ketersediaan bahan baku dalam negeri.²⁸ Salah satu sektor yang paling terpengaruh adalah industri benang filamen yang dibanjiri impor dari Tiongkok.²⁹ Hal ini membuat produk lokal sulit bersaing meskipun kapasitas bahan baku lokal tersedia.

Selain itu, tingginya biaya energi di Indonesia semakin memperburuk daya saing industri tekstil domestik. Contohnya, harga gas industri di Indonesia nyaris empat kali lipat harga gas industri di Tiongkok. Harga gas yang tinggi ini menyumbang sekitar 17% dari harga jual produk serat dan benang.³⁰ Biaya gas yang tinggi ini semakin mengurangi efisiensi produksi dan menjadikan produk lokal semakin sulit bersaing di pasar global. Dengan demikian, meskipun Indonesia memiliki kapasitas produksi bahan baku lokal, harga tinggi akibat biaya energi dan impor murah mengancam daya saing industri tekstil domestik.

Meski begitu, Indonesia memiliki potensi besar yang belum dimanfaatkan optimal untuk memperkuat sektor hulu industri tekstil melalui pengembangan bahan baku lokal seperti bambu dan rami. Ketergantungan Indonesia pada impor kapas sangat tinggi, sementara produksi domestik hanya memenuhi kurang dari 1% kebutuhan nasional.³¹ Di sisi lain, serat alternatif rami memiliki daya tahan lebih kuat daripada kapas dan banyak dipakai di Tiongkok serta India.³² Dengan memperkuat sektor hulu, Indonesia dapat membangun fondasi yang lebih mandiri dan kompetitif untuk seluruh industri tekstil nasional.

II. SEKTOR ANTARA (MIDSTREAM)

Definisi dan Peran Rantai Pasok

Sektor antara (*midstream*) industri tekstil memainkan peran strategis dalam rantai pasok dengan mengolah benang menjadi kain dan produk setengah jadi yang siap diproses lebih lanjut di sektor hilir. Segmen ini mencakup industri pertenunan, perajutan, pencelupan, pencapan, penyempurnaan, dan kain non tenun (*nonwoven*) yang masing-masing memiliki fungsi spesifik dalam menghasilkan kain mentah hingga kain jadi. Karakteristik industri *midstream* meliputi keterlibatan tenaga kerja yang lebih banyak dibandingkan hulu dan penggunaan teknologi yang masih cukup signifikan. Selain itu, aktivitas seperti pencapan menekankan pada kreativitas desain, sementara pencelupan memerlukan manajemen limbah yang baik dengan biaya tinggi.³³ Peran strategis sektor ini menjadikannya sebagai penghubung vital antara produksi

benang di hulu dan pembuatan pakaian jadi di hilir, serta sebagai penentu daya saing produk tekstil Indonesia di pasar domestik dan global.

Jenis dan Hasil Produksi

Untuk memahami struktur dasar sektor antara ini, berikut adalah klasifikasi jenis industri tekstil beserta hasil produksinya, mulai dari industri pertenunan hingga kain non-tenun.

Jenis Industri	Tujuan Pengolahan
Industri pertenunan (<i>weaving</i>)	mengolah benang menjadi kain tenun mentah (<i>grey fabric</i>)
Industri perajutan (<i>knitting</i>)	mengolah benang menjadi kain rajut mentah (<i>grey fabric</i>)
Industri pencelupan (<i>dyeing</i>)	mengolah kain mentah menjadi kain setengah jadi dengan memberikan efek warna pada kain
Industri pencapan (<i>printing</i>)	mengolah kain mentah menjadi kain setengah jadi dengan memberikan efek motif warna pada kain
Industri penyempurnaan (<i>finishing</i>)	mengolah kain setengah jadi menjadi kain jadi (<i>finish fabric</i>)
Industri non-tenun (<i>nonwoven</i>)	mengolah serat atau benang menjadi kain selain melalui proses tenun atau rajut.

Sumber: Buku Analisis Pembangunan Industri, Kementerian Perindustrian (2021)

Tantangan Sektor Antara di Indonesia: Mesin Tua

Sektor antara (*midstream*) industri tekstil Indonesia mengalami penurunan daya saing akibat dominasi mesin produksi yang telah usang yakni lebih dari 20 tahun.³⁴ Mesin-mesin tua yang digunakan gagal memenuhi perkembangan tren pasar. Selain itu, rata-rata mesin tenun, pencelupan, pencapan, dan penyempurnaan di dalam negeri hanya mampu memproduksi kain dengan lebar maksimal 165 cm, padahal pasar juga membutuhkan kain dengan lebar di atas 200 cm.³⁵ Keterbatasan ini bukan hanya menurunkan daya saing, tetapi juga menghambat pemenuhan kebutuhan bahan untuk industri hilir. Maka, revitalisasi mesin di sektor *midstream* menjadi langkah strategis untuk memperkuat struktur industri TPT nasional. Revitalisasi ini juga membuka peluang untuk langsung mengadopsi teknologi ramah lingkungan dan lebih hemat energi, memperkuat daya saing global industri TPT.

III. SEKTOR HILIR (DOWNSTREAM)

Definisi dan Peran Rantai Pasok

Sektor hilir industri tekstil Indonesia memainkan peran strategis dalam menyediakan produk tekstil siap pakai yang langsung dikonsumsi masyarakat. Segmen ini mencakup industri pakaian jadi (*garment*), bordir (*embroidery*), dan produk tekstil lainnya seperti tekstil rumah tangga. Industri di sektor ini bersifat padat karya

dan paling banyak menyerap tenaga kerja di dalam rantai pasok tekstil.³⁶ Pada tahun 2024, sektor ini mempekerjakan hampir 3 juta orang dan mencakup 75% dari total pekerja di rantai pasok tekstil.³⁷ Oleh karena itu, selain menjadi sektor yang paling dekat dengan konsumen, sektor ini juga menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di industri TPT.

Jenis dan Hasil Produksi

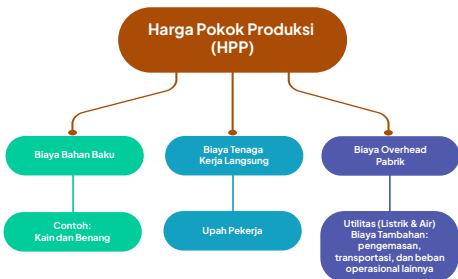
Jenis Industri	Tujuan Pengolahan
Industri pakaian jadi (garment)	Mengolah kain jadi menjadi pakaian jadi baik kain rajut maupun kain tenun
Industri bordir (embroidery)	Memberikan efek motif atau corak pada kain jadi ataupun barang jadi tekstil
Industri produk jadi tekstil lainnya	Industri tekstil rumah tangga

Sumber: Buku Analisis Pembangunan Industri, Kementerian Perindustrian (2021)

Tantangan Sektor Hilir di Indonesia: Ongkos Produksi dan Impor Produk Murah

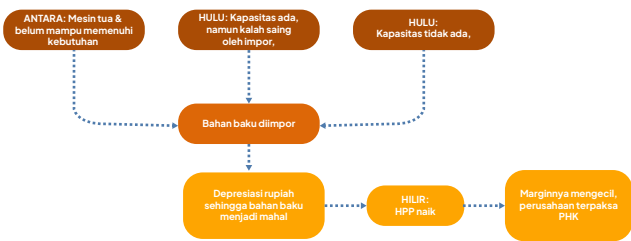
Sektor hilir industri tekstil Indonesia saat ini menghadapi tekanan ganda akibat meningkatnya ongkos produksi dan membanjirnya produk impor ilegal dari Tiongkok yang dijual dengan harga sangat murah. Kondisi ini membuat produsen lokal sulit bersaing di tpasar, yang pada akhirnya mengancam kelangsungan usaha mereka. Bagian berikut akan menjabarkan secara lebih lanjut permasalahan-permasalahan tersebut untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi aktual sektor hilir tekstil.

1. Ongkos Produksi Mahal, Pabrik Tertekan



Gambar 4. Komponen Harga Pokok Produksi

Kami menduga bahwa pemutusan tenaga kerja berkaitan dengan struktur biaya di industri hilir. Untuk menekan Harga Pokok Produksi (HPP) dan meningkatkan daya saing, perlu dipahami secara rinci komponen pembentuk HPP. Secara umum, HPP tekstil tersusun atas tiga elemen utama: biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik (biaya produksi yang dikeluarkan selain untuk keperluan bahan baku dan biaya tenaga kerja secara langsung).³⁸ Komponen tersebut dapat dipelajari dalam **Gambar 4**. Ketepatan pengelolaan ketiga komponen ini krusial untuk menjaga efisiensi biaya dan memperkuat posisi harga produk di pasar.



Gambar 5 Analisis Dampak Ketergantungan Barang Baku Impor Terhadap PHK di Sektor Hilir Tekstil

Ketergantungan terhadap impor bahan baku kami duga menjadi penyebab utama terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor hilir industri. Hal ini terjadi karena industri dalam negeri, baik di bagian hulu maupun antara, belum mampu menyediakan bahan baku yang memadai. Tidak hanya karena kurangnya kapasitas, namun juga kalah saing dengan impor murah, serta keterbatasan teknologi dan mesin. Akibatnya, perusahaan terpaksa mengandalkan bahan baku impor. Ketika nilai tukar rupiah melemah, harga bahan baku impor melonjak, menyebabkan naiknya harga pokok produksi (HPP). Kondisi ini mempersempit margin keuntungan perusahaan di sektor hilir, sehingga mereka terpaksa melakukan efisiensi biaya, salah satunya dengan melakukan PHK. Dengan demikian, ketergantungan pada impor bahan baku dapat memberikan tekanan besar pada keberlangsungan tenaga kerja di dalam negeri.

2. Banjir Pakaian Impor Murah Ilegal

Masuknya impor ilegal pakaian jadi secara masif telah merusak struktur pasar dan menekan industri hilir tekstil nasional. Praktik yang disebut *dumping* ini berlangsung sejak lama, terbukti dari perbedaan signifikan antara data ekspor pakaian jadi dari Tiongkok ke Indonesia versi International Trade Center (ITC) dan data impor versi BPS, dengan selisih kumulatif mencapai USD 5,15 miliar selama 2004 hingga 2023. Produk ilegal ini tidak dikenai bea masuk, pajak, royalti merek, sehingga dapat dijual jauh lebih murah daripada produk resmi—contohnya, sepasang pakaian anak bisa dijual Rp35.000, jauh di bawah harga produk impor resmi Rp150.000. Ketimpangan ini menciptakan perdagangan yang tidak adil, mematikan ritel resmi, mengganggu industri lokal, dan berdampak langsung pada hilangnya lapangan kerja. Meski pemerintah telah menerapkan *safeguard tariff* (pengamanan perdagangan melalui tarif) dan berencana menaikkan tarif impor, akar persoalan terletak pada lemahnya pengawasan serta penegakan hukum atas jalur distribusi ilegal.³⁹ Meskipun terdapat Satgas Impor Ilegal melibatkan 11 kementerian dan lembaga, kinerjanya dinilai lambat dan tidak efektif karena kurangnya penindakan tegas serta landasan hukum yang lemah, hanya berbentuk Keputusan Menteri Perdagangan.⁴⁰ Tanpa langkah tegas terhadap impor ilegal, kebijakan proteksi apapun tidak akan melindungi sektor tekstil nasional secara efektif.

BAGIAN III REKOMENDASI

I. Jangka pendek: melindungi industri padat karya TPT yang tertekan

Penerapan Tarif & Hambatan Non-Tarif

Indonesia perlu berupaya menekan biaya produksi untuk mencapai tingkat paling efisien. Penerapan tarif dan hambatan non-tarif perlu diperkuat untuk melindungi industri tekstil nasional dari praktik perdagangan yang tidak adil. Fenomena overproduksi tekstil secara global, yang diperparah oleh ketidakmerataan subsidi ekspor di beberapa negara, semakin mempertegas kebutuhan Indonesia untuk melindungi industri padat karya nasional melalui kebijakan perdagangan yang adil. Oleh karena itu, Indonesia perlu mempertimbangkan peningkatan bea masuk untuk produk tekstil tertentu dari negara-negara tersebut, sekaligus memperluas penggunaan instrumen seperti kebijakan *anti-dumping* (pengenaan bea masuk untuk menghadapi banjir impor). Pendekatan ini akan memberi ruang bagi industri nasional untuk tumbuh dan bertransformasi tanpa tertekan oleh gelombang impor murah.

Mengeluarkan Kepres Satgas Impor Ilegal

Pemerintah perlu segera meningkatkan landasan hukum Satgas Impor Ilegal menjadi Keputusan Presiden untuk memperkuat efektivitas pengawasan dan perlindungan industri tekstil nasional. Landasan hukum yang saat ini hanya berbentuk Keputusan Menteri Perdagangan membuat Satgas tidak memiliki otoritas memadai untuk melakukan penindakan tegas,⁴¹ serta membatasi pertanggungjawaban hanya di tingkat kementerian. Kurangnya landasan hukum ini turut menyebabkan lemahnya koordinasi untuk menghalau maraknya impor ilegal, yang dalam jangka panjang mengancam keberlanjutan industri tekstil. Dengan memperkuat dasar hukum Satgas, pemerintah dapat memastikan keberlanjutan industri tekstil nasional dan menjaga kontribusinya terhadap perekonomian. Namun, kebijakan proteksi ini harus disertai dengan upaya revitalisasi industri agar mampu berkompetisi secara berkelanjutan setelah periode perlindungan.

II. Jangka menengah: memperkuat ketahanan industri TPT dari hulu ke hilir

A. Sektor hulu (*Upstream*): menurunkan biaya produksi dalam negeri

1. Penerapan Bea *Anti-Dumping* yang Proporsional

Vietnam telah memperkuat perlindungan industrinya dengan menetapkan bea masuk (*anti-dumping*) terhadap impor benang filamen polyester dari Tiongkok, India, dan beberapa negara lain, termasuk Indonesia.

Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan No. 2302/QD-BCT dan ditetapkan oleh *Trade Remedies Authority* di bawah Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Vietnam. Tindakan ini diambil untuk mencegah persaingan tidak sehat yang merugikan produsen domestik. Vietnam memutuskan untuk tarif *anti-dumping* dengan besaran 17% hingga 60%.⁴²

Pemerintah telah menerapkan mekanisme *anti-dumping* melalui Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTTP) yang sudah dilakukan oleh melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 48 tahun 2024.⁴³ Hal ini perlu dilanjutkan dan dipastikan agar kebijakan tarif yang berlaku tetap sesuai dengan kondisi terbaru. Akan tetapi, bea yang ditetapkan masih berupa nominal tetap seperti 1.000 sampai 5.000 rupiah per meter benang filamen sintetik. Perlu ditinjau agar besaran bea masuk menjadi proporsional sesuai dengan harga barang, contohnya 20% dari harga filamen. Hal ini agar bea masuk bisa adaptif terhadap fluktuasi harga bahan baku.

2. Subsidi gas industri tekstil

Industri hulu tekstil perlu dimasukkan sebagai penerima fasilitas Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) agar bisa bersaing secara adil dengan sektor industri strategis lain yang telah menikmati insentif energi. Pemerintah saat ini hanya memberikan harga gas murah sekitar USD6,5–7 per MMBTU (satuan energi untuk mengubah panas) kepada tujuh sektor industri tertentu, seperti pupuk, petrokimia, dan baja, sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 76 Tahun 2025. Sayangnya tekstil tidak termasuk, padahal, industri tekstil juga padat energi. Kebijakan HGBT terbukti mampu meningkatkan ekspor, dan mendorong investasi di sektor-sektor yang telah menerima insentif ini, dengan total manfaat ekonomi mencapai Rp247,26 triliun selama 2020–2023.⁴⁴ Jika industri hulu tekstil tidak segera dilibatkan dalam skema ini, maka ketimpangan biaya energi akan terus melemahkan daya saing nasional, baik di pasar domestik maupun global. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperluas cakupan HGBT dengan memasukkan industri hulu tekstil ke dalam daftar prioritas selanjutnya.

3. Penjaminan pasokan MEG

India telah mengambil langkah strategis untuk memastikan kecukupan pasokan *monoethylene glycol* (MEG) dengan membangun fasilitas produksi MEG baru, seperti yang ada di Paradip Refinery pada

2024. Fasilitas ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan memastikan pasokan yang stabil bagi industri tekstil domestik. Selain itu, India juga mengembangkan teknologi untuk memproduksi MEG daur ulang (rMEG), yang menggunakan sampah plastik sebagai bahan baku.⁴⁵ Strategi ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor, tetapi juga mendukung tujuan keberlanjutan dengan mengurangi jejak karbon dan memperkuat daya saing industri tekstil di pasar global.

Untuk mengikuti langkah serupa, pemerintah Indonesia perlu menjamin pasokan *monoethylene glycol* (MEG) melalui insentif bagi investasi petrokimia dalam negeri dan perjanjian pasok jangka panjang dengan negara mitra. Mengingat MEG adalah bahan baku vital bagi industri polyester dan tekstil, kestabilan pasokannya akan memperkuat daya saing industri domestik. Upaya ini dapat diwujudkan dengan memberikan kemudahan perizinan dan insentif fiskal kepada pelaku industri hulu yang bersedia membangun fasilitas produksi MEG di Indonesia, sebagaimana yang dilakukan India di Paradip Refinery. Pendekatan ini akan memperkuat ketahanan industri tekstil nasional dalam jangka panjang dan mendukung transformasi menuju industri yang lebih berkelanjutan.

B. Sektor Antara (Midstream)

1. Perluasan skema insentif untuk modernisasi mesin

Perluasan program restrukturisasi mesin perlu dilakukan Indonesia agar dapat bersaing secara teknologi dan produktivitas. Indonesia telah memiliki program restrukturisasi mesin yakni insentif untuk pembaruan mesin oleh Kementerian Perindustrian yang telah diperluas pada 2024, perlu dijalankan dengan baik dan dievaluasi secara berkala. Pada tahun 2024, anggaran yang dialokasikan mencapai Rp35 miliar untuk 45 perusahaan.⁴⁶ Meskipun alokasi anggaran dan jumlah perusahaan yang menerima bantuan meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, faktanya masih jauh dari total perusahaan di industri TPT yang diperkirakan ada sekitar 5.000 perusahaan menengah besar.⁴⁷ Sehingga program ini masih perlu diperluas cakupannya.

C. Sektor Hilir (Downstream)

1. Pembangunan Kemandirian Industri dengan Insentif

Mengurangi ketergantungan pada impor bahan baku merupakan kunci untuk menekan ongkos produksi dan mencegah gelombang PHK di sektor industri hilir. Pemerintah perlu segera mendorong investasi pada industri hulu

melalui insentif fiskal, dukungan teknologi, dan perlindungan terhadap produk lokal yang bersaing dengan impor murah seperti yang diusulkan pada sektor hulu dan antara. Dengan memperkuat rantai pasok domestik, pelaku industri dapat lebih stabil dalam mengelola harga pokok produksi dan mempertahankan daya saing di tengah fluktuasi nilai tukar. Pendekatan ini juga akan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

2. Penguatan Pengawasan Untuk Cegah Banjir Impor Ilegal

Penindakan tegas terhadap impor ilegal harus menjadi prioritas utama untuk melindungi industri tekstil nasional dari praktik dumping yang merusak pasar. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan di titik masuk barang dan jalur distribusi melalui integrasi data kepabeanan, digitalisasi sistem logistik, serta peningkatan kapasitas penegakan hukum. Selain itu, koordinasi antar instansi seperti Bea Cukai, Kepolisian, dan Kementerian Perdagangan harus diperkuat agar tidak ada celah dalam pengendalian barang ilegal. Tanpa penegakan hukum yang efektif, kebijakan tarif dan proteksi tidak akan cukup melindungi industri domestik dari kerusakan struktural akibat perdagangan ilegal. Hal ini perlu dilengkapi oleh Satgas Impor Ilegal yang diperkuat dengan Keputusan Presiden yang telah disebutkan di rekomendasi jangka pendek.

III. Jangka panjang: Transisi dan Perlindungan Pekerja

Dalam jangka panjang, sektor hilir industri tekstil, yang saat ini padat karya, akan mengalami tekanan akibat meningkatnya adopsi teknologi otomatisasi dan digitalisasi. Pengalaman global menunjukkan bahwa pekerjaan-pekerjaan seperti operator mesin jahit, pemotong kain, dan pekerjaan administratif rutin cenderung akan tergantikan oleh mesin dan sistem berbasis digital.

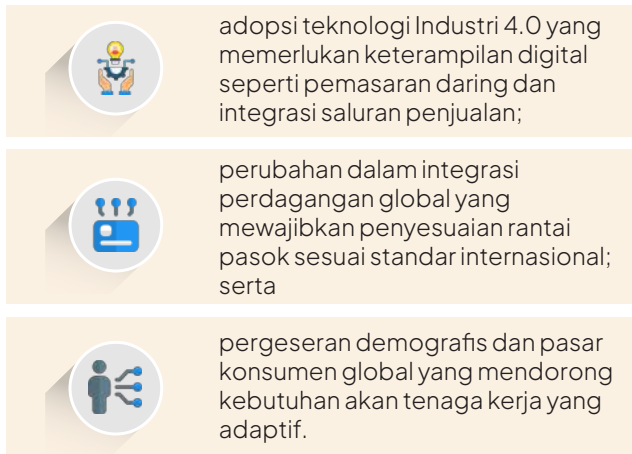
Untuk merancang strategi transisi industri yang inklusif serta program *upskilling* dan *reskilling* yang efektif, penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran keterampilan di sektor tekstil. Berdasarkan ILO Research Brief tentang sektor tekstil Vietnam, terdapat lima faktor utama (Lihat Gambar 6).⁴⁸



tekanan untuk beralih ke produksi berkelanjutan yang menuntut keterampilan hijau, terutama di kalangan UKM;



meningkatnya permintaan pasar global, khususnya Eropa, terhadap produk ramah lingkungan dan fesyen sirkular;



Gambar 6. Faktor yang memengaruhi industri TPT dan pasar keterampilan

Berdasarkan *ILO Research Brief* tentang sektor tekstil Vietnam, beberapa jenis pekerjaan di sektor tekstil kini menuntut keterampilan baru seiring perubahan proses produksi, seperti desainer, penjahit, pemotong kain, penyulam, dan operator mesin jahit.⁴⁹ Di sisi lain, sejumlah pekerjaan administratif seperti petugas gudang dan entri data makin tidak relevan dan berisiko hilang akibat otomatisasi.⁵⁰ Sementara itu, muncul pula peran-peran baru yang membutuhkan kompetensi lebih tinggi, seperti direktur R&D, manajer rantai pasok, desainer fesyen digital, spesialis pemasaran digital, spesialis otomasi dan AI, serta tenaga ahli di bidang desain dan teknologi informasi.⁵¹

Perubahan ini menunjukkan bahwa tantangan ketenagakerjaan di sektor tekstil bukan sekadar soal kehilangan pekerjaan, tetapi juga soal pergeseran keterampilan yang dibutuhkan. Untuk merespons pergeseran ini, ada dua pendekatan yang dapat ditempuh: pertama, peningkatan keterampilan (*upskilling*) dan pelatihan ulang (*reskilling*) bagi tenaga kerja yang terdampak; kedua, penguatan sistem perlindungan sosial bagi mereka yang tak bisa melalui proses di poin pertama (misalnya, pekerja yang mendekati usia pensiun).

1. Upskilling dan Reskilling Pekerja

ILO Research Brief tentang sektor tekstil Vietnam memetakan daftar okupasi di sektor TPT berdasarkan skala ketenagakerjaan dan tingkat permintaan pasar terhadap masing-masing jenis pekerjaan, termasuk identifikasi terhadap pekerjaan yang mengalami kekurangan tenaga kerja (*occupation shortage*).⁵² Hasil pemetaan ini menjadi pijakan bagi pemerintah Vietnam dalam menetapkan target *reskilling* dan *upskilling* di sektor TPT. Indonesia dapat mengambil langkah serupa, yakni memulai dengan pemetaan okupasi secara menyeluruh untuk mengidentifikasi arah pergeseran kebutuhan tenaga kerja. Langkah ini penting sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pengembangan keterampilan yang berbasis permintaan pasar kerja.

Secara konkret, langkah untuk mendukung *upskilling* dan *reskilling* mencakup:

1. pengembangan peta okupasi dan kompetensi nasional di sektor tekstil sebagai dasar penyusunan kurikulum pelatihan yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan standar keberlanjutan global;
2. integrasi pelatihan vokasi ke dalam kebijakan industri nasional, termasuk melalui pembagian biaya (*cost-sharing fiskal*) antara pemerintah dan pelaku usaha; dan
3. mendorong perusahaan penerima insentif fiskal untuk bermitra dengan lembaga pelatihan vokasi dalam menyediakan program magang atau pelatihan berbasis kerja.

2. Perluas skema perlindungan sosial bagi pekerja yang terdampak

Pekerja dengan keterampilan yang kurang spesifik atau yang bekerja dalam tugas-tugas rutin yang mudah digantikan oleh teknologi, berisiko besar kehilangan pekerjaan tanpa jaminan penggantian pendapatan yang memadai. Dalam konteks ini, memperluas skema perlindungan sosial menjadi langkah krusial untuk menjaga kesejahteraan pekerja dan menjaga stabilitas sosial-ekonomi. Studi menunjukkan bahwa asuransi pengangguran (*unemployment insurance*) yang besar dapat mengurangi efek negatif dari otomasi terhadap gaji pekerja, terutama pekerja tanpa pendidikan tinggi.⁵³ Perlindungan sosial (*social protection*) juga penting untuk membantu individu mengatasi dampak dari kemajuan teknologi terhadap pasar tenaga kerja, tapi efektivitas dari instrumen kebijakan bergantung pada beberapa faktor: paparan terhadap otomasi, dan juga cakupan, desain, dan besarnya manfaat dari sistem perlindungan sosial yang ada.⁵⁴

Secara konkret, skema perlindungan sosial ini dapat mencakup:

1. Pengembangan mekanisme *income replacement* atau asuransi kehilangan pekerjaan bagi pekerja yang terkena PHK akibat otomatisasi. Skema ini perlu dirancang dengan cakupan yang lebih luas dan manfaat yang memadai untuk mengurangi dampak langsung terhadap pendapatan pekerja.
2. Penyediaan opsi jaminan sosial atau pensiun dini bagi pekerja yang berada dalam kelompok yang tidak dapat dilatih ulang (*non-reskillable*), seperti mereka yang mendekati usia pensiun dan tidak dapat mengikuti pelatihan ulang atau peralihan keterampilan yang signifikan.
3. Perluasan cakupan dan desain sistem perlindungan sosial, dengan memastikan bahwa pekerja yang terkena dampak

perubahan teknologi, terutama yang berpendidikan rendah, mendapat akses yang cepat dan mudah ke dukungan finansial sementara mereka bertransisi ke pekerjaan baru atau pensiun.

Penutup

Policy brief ini mengusulkan strategi untuk memastikan keberlanjutan industri tekstil sekaligus melindungi pekerjaanya. Pendekatan yang diajukan mencakup langkah-langkah jangka pendek untuk melindungi industri TPT dari serbuan impor, jangka menengah untuk memperkuat daya saing dari hulu ke hilir, dan jangka panjang untuk mengarahkan transisi dengan fokus pada perlindungan sosial serta peningkatan keterampilan bagi pekerja yang terdampak.

Transformasi sektor tekstil ini bukan hanya tentang bertahan menghadapi perubahan, tetapi tentang membangun industri masa depan Indonesia yang lebih hijau, cerdas, dan berdaya saing global. Langkah ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, yaitu sebuah ekonomi yang berkelanjutan, masyarakat yang sejahtera, dan sektor yang mampu berdiri tegak di tengah dinamika global yang terus berubah.

End notes

1. Data BPS 2024 yang diolah oleh Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan “Sengkarut Industri Tekstil, Tenaga Kerja Tekstil Menciut.” Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan PE.12.01/ND-495/RJ/2/2024 p.1
2. Badan Pusat Statistik (BPS), Jumlah Tenaga Kerja Industri Besar dan Sedang Menurut Sub Sektor, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NzMwZlI=/jumlah-tenaga-kerja-industri-besar-dan-sedang-menurut-sub-sektor--kbli-2020-.html>
3. Ibid.
4. Fadilah, "Kemenaker Buka Suara Soal 250 Ribu Buruh Kena PHK," Detik Finance, 25 Maret 2024, <https://finance.detik.com/industri/d-7692982/kemnaker-buka-suara-soal-250-ribu-buruh-kena-phk-60-pabrik-tekstil-gulung-tikar>
5. Muhid, “Kisah PT Sritex yang pailit dililit utang setelah 58 tahun berjaya,” Tempo.co, 3 Maret 2025, <https://www.tempo.co/ekonomi/kisah-pt-sritex-yang-pailit-dililit-utang-setelah-58-tahun-berjaya-1214544>
6. Data diperoleh dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, Sengkarut Industri Tekstil, Tenaga Kerja Tekstil Menciut (2024), PE.12.01/ND-495/RJ/2/2024, p. 1, and Damiana, “60 Pabrik Tekstil PHK Ribuan-Tutup di 2022–2024, Kini Tambah 2 Lagi,” Cnbcindonesia.com, 8 Januari 2025, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20250108145535-4-601673/60-pabrik-tekstil-phk-ribuan-tutup-di-2022-2024-kini-tambah-2-lagi>
7. Ibid.
8. Proyeksi ini dinyatakan oleh Direktur Ekonomi Digital Center of Economics and Law Studies (Celios), Nailul Huda, di Diskusi Forum Wartawan Industri, Antaraneews.com, 17 Maret 2025, <https://www.antaraneews.com/berita/4777133/celios-sebut-12-juta-pekerja-potensi-terkena-phk-imbas-perang-tarif>
9. Rita Anggraeni, “Impor Tekstil Ilegal China Capai Rp90 Miliar, Biang Kerok Gejolak Industri TPT”, Bisnis.com, 8 November 2024, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20241108/12/1814453/impor-tekstil-ilegal-china-capai-rp90-miliar-biang-kerok-gejolak-industri-tpt>
10. Data International Trade Center yang diolah oleh Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan “Sengkarut Industri Tekstil, Tenaga Kerja Tekstil Menciut.” Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan PE.12.01/ND-495/RJ/2/2024 p.3
11. INDEF. (2024) dari Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan “Sengkarut Industri Tekstil, Tenaga Kerja Tekstil Menciut.” Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan PE.12.01/ND-495/RJ/2/2024 p.4

- 12.** Shabrina, "Indonesia Terancam Kebanjiran Produk Tekstil Impor Imbas Tarif Trump," Tempo.co, 4 April 2025,
<https://www.tempo.co/ekonomi/indonesia-terancam-kebanjiran-produk-tekstil-imp-or-imb-as-tarif-trump--1227565>
- 13.** Ibid.
- 14.** "Mesin Tua Jadi Kelemahan Industri Tekstil Nasional," Tempo.co, 14 Oktober 2019,
<https://www.tempo.co/ekonomi/mesin-tua-jadi-kelemahan-industri-tekstil-nasional-696439>
- 15.** Islamiati, "PHK Industri Tekstil Berlanjut, Kemenperin Salahkan Mesin Tua," Bisnis.com, 14 Juni 2023,
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20230614/257/1665485/phk-industri-tekstil-berlanjut-kemenperin-salahkan-mesin-tua>
- 16.** Nurdifa, "Ekonom Blak-blakan Penyebab Sritex (SRIL) Pailit, Ini Biang Keroknya," Bisnis.com, 24 Desember 2024,
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20241224/257/1826705/ekonom-blak-blakan-penyebab-sritex-sril-pailit-ini-biang-keroknya>
- 17.** Nadeak, "Prabowo tetapkan UMP 2025 naik 6,5%," Cnbcindonesia.com, 4 Desember 2024,
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20241204061911-92-1173472/prabowo-tetapan-ump-2025-naik-65-persen-cukup-dan-idealkah>
- 18.** Fitriyani, "Tekstil RI Terancam Dumping, Prabowo Mau Bentuk Satgas Percepatan Padat Karya," Kumparan.com, 19 Maret 2025,
<https://kumparan.com/kumparanbisnis/tekstil-ri-terancam-dumping-prabowo-mau-bentuk-satgas-percepatan-padat-karya-24iA0x6Yn3f>
- 19.** Ibid.
- 20.** Dimas Andi, "Dibanjiri Produk Impor, Kemenperin Akui Jumlah Tenaga Kerja di Industri TPT Berkurang," Kontan.co.id, August 8 2024,
<https://industri.kontan.co.id/news/dibanjiri-produk-imp-or-kemenperin-akui-jumlah-tenaga-kerja-di-industri-tpt-berkurang>
- 21.** ILO. (2016). ASEAN in Transformation: The Future of Jobs At Risk of Automation.
https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/@ed_dialogue/@act_emp/documents/publication/wcms_579554.pdf p.1
- 22.** "a robotic sewing machine could throw garment workers in low-cost countries out of a job," dari The Economist, "Made to measure", Technology Quarterly, 30 May 2015,
www.economist.com/news/technology-quarterly/21651925-robotic-sewing-machine-could-throw-garment-workers-low-cost-countries-out
- 23.** "Rupiah Keok, Pengusaha Tekstil Cemas Barang China Merajalela Serbu RI," CNBC Indonesia, 19 Desember 2024,
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20241219184212-4-597451/rupiah-keok-pengusaha-tekstil-cemas-barang-china-merajalela-serbu-ri>

- 24.** Kementerian Perindustrian. 2021. Mendorong Kinerja Industri Tekstil dan Produk Tekstil di Tengah Pandemi.
<https://www.kemenperin.go.id/download/26656/Buku-Analisis-Industri-Tekstil-dan-Produk-Tekstil-2021>
- 25.** PT Asia Pacific Fibers Tbk. Laporan Keuangan Konsolidasian 2024. Jakarta: Bursa Efek Indonesia, Maret 2025, p.21.
https://www.idx.co.id/StaticData/NewsAndAnnouncement/ANNOUNCEMENTSTOCK/From_EREP/202403/20250330152634-51499-0/Final%20Report%20LK%20Konsolidasian%20POLY%202024.pdf
- 26.** Dimas Andi, "Industri Polyester Terancam Berhenti Produksi Akibat Impor Bahan Baku Sulit," Kontan.co.id, 13 Februari 2024,
<https://industri.kontan.co.id/news/industri-polyester-terancam-berhenti-produksi-akibat-impor-bahan-baku-sulit>.
- 27.** Dimas Andi, "Industri Polyester Terancam Berhenti Produksi Akibat Impor Bahan Baku Sulit," Kontan.co.id, 13 Februari 2024,
<https://industri.kontan.co.id/news/industri-polyester-terancam-berhenti-produksi-akibat-impor-bahan-baku-sulit>.
- 28.** Nurdifa, "Produsen Tekstil Hulu Saling Sikut Aturan Impor, Ada Apa?" Bisnis.com, 3 Maret 2025,
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20250303/257/1843767/produsen-tekstil-hulu-saling-sikut-aturan-impor-ada-apa>
- 29.** Rachmawati, "Impor Benang Filamen China Hantam Industri Domestik, KPPI Lakukan Penyelidikan," Bisnis.com, 28 Oktober 2023,
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20231028/257/1708773/impor-benang-filamen-china-hantam-industri-domestik-kppi-lakukan-penyelidikan>
- 30.** Harga gas industri di Indonesia rata-rata US\$15 per millions of british thermal units atau MMBTU (satuan energi gas alam untuk memproduksi panas), sedangkan harga gas industri di Tiongkok sekitar US\$4 per MMBTU. APSyFI (Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia), "Competitive Weaknesses Hamper Growth of Indonesia's Upstream Textile Industry," Apsyfi, 2 Maret 2025,
<https://apsyfi.org/news/124>.
- 31.** Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. "Menguak Potensi Indonesia dalam Produksi Kapas." Pertanian.go.id, 12 Januari 2025,
<https://perkebunan.bsip.pertanian.go.id/berita/menguak-potensi-indonesia-dalam-produksi-kapas>
- 32.** Yang dimaksud daya tarik adalah daya tahan (tensile strength) agar tidak mudah putus. Badan Standardisasi Instrumen Pertanian. "Potensi Serat Alam Indonesia dalam Industri Modern." Pertanian.go.id, 27 Desember 2024.
<https://perkebunan.bsip.pertanian.go.id/berita/potensi-serat-alam-indonesia-dalam-industri-modern>
- 33.** Kementerian Perindustrian. 2021. Mendorong Kinerja Industri Tekstil dan Produk Tekstil di Tengah Pandemi.
<https://www.kemenperin.go.id/download/26656/Buku-Analisis-Industri-Tekstil-dan-Produk-Tekstil-2021>

- 34.** Agus Purnomo. Pemetaan Rantai Pasokan di Industri Tekstil dan Produk Tekstil. Penerbit Arta Media, 2024. ISBN 978-623-8571-28-4, p.2.
- 35.** Data ini disebutkan oleh Elis Masitoh selaku pejabat fungsional Kementerian Perindustrian dan pernah menjabat sebagai Direktur Industri Tekstil, Kulit, dan Alas Kaki, Kementerian Perindustrian dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. TVR Parlemen BALEG DPR RI RDPU dengan Narasumber Elis Masitoh (Pemerhati Tekstil) dan IPKB. 21 Juni 2023. YouTube video, Menit 59:00-59:20.. <https://www.youtube.com/watch?v=Wdsc3viHxiQ>.
- 36.** Kementerian Perindustrian. 2021. Mendorong Kinerja Industri Tekstil dan Produk Tekstil di Tengah Pandemi. <https://www.kemenperin.go.id/download/26656/Buku-Analisis-Industri-Tekstil-da-n-Produk-Tekstil-2021>
- 37.** Dimas Andi, "Dibanjiri Produk Impor, Kemenperin Akui Jumlah Tenaga Kerja di Industri TPT Berkurang," Kontan.co.id, 8 Agustus 2024, <https://industri.kontan.co.id/news/dibanjiri-produk-impor-kemenperin-akui-jumlah-tenaga-kerja-di-industri-tpt-berkurang>
- 38.** Md. Monirul Islam Rajib, Md. Mehedi Hasan Parvez, Md. Shoful Islam, Tanveer Ahmed, dan Md. Rashedul Islam, "Complete Garment Costing with Major Cost Breakdown," Journal of Textile Science and Technology 9, no. 2 (2023): 115-126, <https://doi.org/10.4236/jtst.2023.92008>
- 39.** Yogatama, "Impor Ilegal Pakaian Jadi Diduga Sudah Berlangsung Sejak 20 Tahun Lalu," Kompas.id, 5 Juli 2024, diakses 21 April 2025. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/07/05/impor-ilegal-pakaian-jadi-diduga-sudah-berlangsung-sejak-20-tahun-lalu>.
- 40.** Pernyataan disampaikan oleh Koordinator Aliansi Masyarakat Tekstil Indonesia (AMTI) Agus Riyanto. Afiffah Rahmah Nurdifa, "Satgas Impor Ilegal Disebut Belum Efektif, Industri Tekstil Masih Semrawut," Bisnis.com, 20 Agustus 2024, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240820/12/1792029/satgas-impor-ilegal-disebut-belum-efektif-industri-tekstil-masih-semrawut>.
- 41.** Nurdifa, Afiffah Rahmah. "Satgas Impor Ilegal Disebut Belum Efektif, Industri Tekstil Masih Semrawut." Bisnis.com, August 20, 2024. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20240820/12/1792029/satgas-impor-ilegal-disebut-belum-efektif-industri-tekstil-masih-semrawut>.
- 42.** Contohnya tarif 17% untuk produk asal Tiongkok dan 54,9% untuk produk asal India. "Vietnam Imposes Anti-Dumping Duty on Polyester Yarn Imports," Vietnam Trade Remedies Authority, diakses 21 April 2025, <https://antidumping.vn/vietnam-imposes-anti-dumping-duty-on-polyester-yarn-imports-n27719.html>.
- 43.** detikFinance, "Sri Mulyani Rilis Aturan Bea Masuk Anti-Dumping Produk Tekstil, Ini Isinya," detikFinance, 7 Agustus 2024, <https://finance.detik.com/industri/d-7477193/sri-mulyani-rilis-aturan-bea-masuk-a>

nti-dumping-produk-tekstil-ini-isinya.

- 44.** Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. "Skema Baru HGBT: Perkuat Daya Saing Industri dan Efisiensi Anggaran Negara," diakses 21 April 2025,
<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/skema-baru-hgbt-perkuat-daya-saing-industri-dan-efisiensi-anggaran-negara>
- 45.** IMARC Group. India Monoethylene Glycol (MEG) Market: Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2024–2033, diakses 22 April 2025.
<https://www.imarcgroup.com/india-monoethylene-glycol-market>.
- 46.** Tribunnews.com, "Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Dongkrak Kinerja Industri TPT," 4 Oktober 2024,
<https://www.tribunnews.com/bisnis/2024/10/04/program-restrukturisasi-mesinperalatan-dongkrak-kinerja-industri-tpt>.
- 47.** Berdasarkan data API, pada 2020–2021 jumlah perusahaan TPT skala menengah besar tercatat 5.863 perusahaan. Kompas, "Industri Tekstil Jungkir Balik untuk Bertahan," Kompas.id, 29 Maret 2023,
<https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/03/29/industri-tekstil-jungkir-balik-untuk-bertahan>.
https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/03/29/industri-tekstil-jungkir-balik-untuk-bertahan?status=sukses_login&login=1745835054825&open_from=header_button&loc=header_button
- 48.** ILO. (2025). Towards a skills strategy for the textile and garment industry in Viet Nam: Sector analysis, priority skills needs, actions, and recommendations.
<https://www.ilo.org/sites/default/files/2025-03/Reseach%20brief%20Work%20Garmen%20Skills%20web.%20eng.pdf> p.7
- 49.** ILO. (2025). Towards a skills strategy for the textile and garment industry in Viet Nam: Sector analysis, priority skills needs, actions, and recommendations.
<https://www.ilo.org/sites/default/files/2025-03/Reseach%20brief%20Work%20Garmen%20Skills%20web.%20eng.pdf> p.8
- 50.** Ibid.
- 51.** Ibid
- 52.** ILO. (2025). Towards a skills strategy for the textile and garment industry in Viet Nam: Sector analysis, priority skills needs, actions, and recommendations.
<https://www.ilo.org/sites/default/files/2025-03/Reseach%20brief%20Work%20Garmen%20Skills%20web.%20eng.pdf> p.9
- 53.** Brollo, Fernanda. (2024) Strengthening Social Protection to Pave the Way for Technological Innovation: Evidence from the U.S. IMF.
<https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2024/05/03/Strengthening-Social-Protection-to-Pave-the-Way-for-Technological-Innovation-Evidence-from-548577> p.4
- 54.** Brollo, Fernanda. (2024) Strengthening Social Protection to Pave the Way for

Technological Innovation: Evidence from the U.S. IMF.

<https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2024/05/03/Strengthening-Social-Protection-to-Pave-the-Way-for-Technological-Innovation-Evidence-from-548577> p.14